

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SKRIPSI OLEH**

**SELVI LISKHA SARI**

**01021281823050**

**EKONOMI PEMBANGUNAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**“ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

Disusun Oleh :

Nama : Selvi Liskha Sari  
NIM : 01021281823050  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**

3 Juni 2022

Ketua :  Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
NIP 197403252009121001

24 Mei 2022

  
Anggota : Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si  
NIP 198506122015101101

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disusun Oleh:

Nama : Selvi Liskha Sari  
NIM : 01021281823050  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Juli 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

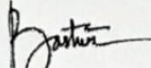
Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, September 2022

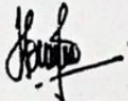
Ketua

Anggota

Anggota


  
Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
NIP. 197403252009121001

  
Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si  
NIP. 198506122015101101

  
Feny Marissa, S.E., M. Si  
NIP. 199004072018032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

  
Dr. Mukhlis, S.E., M. Si  
NIP. 197304062010121601

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 6-9-2022  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Selvi Liskha Sari  
NIM : 01021281823050  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing :

Ketua : Dr. Sukanto, S.E., M.Si  
Anggota : Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
Tanggal Ujian : 22 Juli 2022

Adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 25 Juli 2022

Pembuat Pernyataan,

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 6-9-2022  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Selvi Liskha Sari

NIM. 01021281823050

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin dapat diselesaikan.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh antara kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada para akademisi, pemerintah, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat luas pada umumnya serta para *stakeholder* yang berkepentingan.

Indralaya, 25 Juli 2022

Penulis,



Selvi Liskha Sari

NIM. 01021281823050

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berjalannya proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya selaku hamba-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Ayah Drs. Khairullah, MT, Ibu Elistin, Selly Novikha Sari, M. Akbar Alfatih selaku orang tua, saudara perempuan dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa serta selalu rela berkorban sehingga saya bisa mendapat kelancaran dan semangat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sukanto, S.E., M.Si dan Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Feny Marissa, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya serta telah membantu memberikan kritik, saran dan masukan untuk skripsi saya.
5. Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat untuk saya ketika saya butuh bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Para dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.

8. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Kampus Indralaya yang selalu memberi warna dalam proses perkuliahan saya.
9. Teman-teman Konsentrasi Keuangan Daerah 2018 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan selama beberapa semester.
10. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Wilda Widya Sari, Putri Alisia Renada, Yutika Jutralita, dan Alda Sanita yang telah memberikan keceriaan, hiburan dan menjadi teman refreshing saat saya hilang semangat dalam menjalani perkuliahan dan saat proses menyusun skripsi.
11. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan untuk terus semangat menjalani perkuliahan.

Indralaya, 25 Juli 2022

Penulis,



Selvi Liskha Sari

NIM.01021281823050

## ABSTRAK

### ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Oleh:

Selvi Liskha Sari; Sukanto; Abdul Bashir


Indikator dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien sehingga mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2015-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

*Kata kunci: Kemiskinan, Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Daerah*

Ketua

  
Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
NIP. 197403252009121001

Anggota

  
Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si  
NIP. 198506122015101101

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

  
Dr. Mukhlis, S.E., M. Si  
NIP. 197304062010121001



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY, REGIONAL FINANCIAL AUTONOMY, AND REGIONAL EXPENDITURE ON POVERTY IN NORTH MUSI RAWAS REGENCY AND MUSI BANYUASIN REGENCY

By:

Selvi Liskha Sari; Sukanto; Abdul Bashir

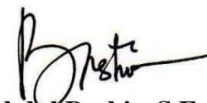
Indicators in regional financial management consist of regional financial capability, regional financial autonomy, and regional expenditure, so regional financial management must be implemented with effective and efficient principles to affect poverty alleviation. This study aims to analyze the effect of regional financial capability, regional financial autonomy, and regional expenditure on poverty in North Musi Rawas Regency and Musi Banyuasin Regency. The data used in this study is secondary data from 2015-2020. The analysis technique that is used is multiple linear regression. The results showed that regional financial capability and regional financial autonomy has no significant effect on poverty in North Musi Rawas Regency and Musi Banyuasin Regency. Regional expenditure has no significant effect on poverty in North Musi Rawas Regency, but regional expenditure has a significant effect on poverty in Musi Banyuasin Regency.

**Keywords:** *Poverty, Regional Financial Capability, Regional Financial Autonomy, Regional Expenditure*


First Advisor

  
Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
NIP. 197403252009121001

Member

  
Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si  
NIP. 198506122015101101

Acknowledge by,  
Head of Development Economics Department

  
Dr. Mukhlis, S.E., M. Si  
NIP. 197304062010121001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Selvi Liskha Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 17 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah (Orangtua) : JL. Kehutanan 005 Pondok Labu No. 221B, RT  
018 RW 006, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat,  
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Email : selvisari661@gmail.com  
No. Handphone : 085269942730  
Pendidikan Formal

- 2006-2012 : SD Santo Yosef Lahat
- 2012-2015 : SMP Negeri 5 Lahat
- 2015-2018 : SMA Negeri 1 Lahat
- 2018-2022 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas  
Ekonomi, Universitas Sriwijaya



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....	10

2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 <i>Grant Theory</i> .....	10
2.1.1.1 Teori <i>Fiscal Federalism</i> .....	10
2.1.2 Teori Berkaitan Antar-Konsep/Variabel .....	12
2.1.2.1 Kemiskinan .....	12
2.1.2.2 Otonomi Daerah.....	13
2.1.2.3 Keuangan Daerah.....	15
2.1.2.4 Kemampuan Keuangan Daerah .....	16
2.1.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah .....	18
2.1.2.6 Belanja Daerah.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Kerangka Pikir .....	27
2.4 Hipotesis Penelitian .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.3 Teknik Analisis .....	31
3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	31
3.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.3.5 Uji Hipotesis .....	34
3.4 Definisi Variabel .....	36

3.4.1 Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	36
3.4.2 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1 Gambaran Umum .....	38
4.1.1 Kabupaten Musi Rawas Utara .....	38
4.1.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	38
4.1.1.2 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara .....	39
4.1.1.3 Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	41
4.1.1.4 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	42
4.1.1.5 Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara .....	43
4.1.2 Kabupaten Musi Banyuasin .....	45
4.1.2.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif di Kabupaten Musi Banyuasin .....	45
4.1.2.2 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	46
4.1.2.3 Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin .....	48
4.1.2.4 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin .....	49

4.1.2.5 Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	52
4.2.1 Kabupaten Musi Rawas Utara .....	52
4.2.1.1 Hasil Regresi Linear Berganda .....	52
4.2.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.1.2.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.2.1.2.3 Uji Autokorelasi.....	55
4.2.1.2.4 Uji Multikolinieritas.....	55
4.2.1.3 Uji Signifikansi .....	56
4.2.1.3.1 Uji T (Secara Parsial).....	56
4.2.1.3.2 Uji F (Secara Simultan).....	58
4.2.1.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
4.2.1.4 Pembahasan.....	60
4.2.1.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah.....	60
4.2.1.4.2 Kemandirian Keuangan Daerah .....	61
4.2.1.4.3 Belanja Daerah .....	63
4.2.2 Kabupaten Musi Banyuasin .....	64
4.2.2.1 Hasil Regresi Linear Berganda .....	64
4.2.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	65

4.2.2.2.1 Uji Normalitas .....	66
4.2.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	66
4.2.2.2.3 Uji Autokorelasi .....	67
4.2.2.2.4 Uji Multikolinieritas .....	68
4.2.2.3 Uji Signifikansi .....	69
4.2.2.3.1 Uji T (Secara Parsial) .....	69
4.2.2.3.2 Uji F (Secara Simultan).....	71
4.2.2.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71
4.2.2.4 Pembahasan .....	72
4.2.2.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah.....	72
4.2.2.4.2 Kemandirian Keuangan Daerah .....	73
4.2.2.4.3 Belanja Daerah .....	75
4.2.3 Hasil Penelitian Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin .....	76
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	85

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	5
Tabel 1.2 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin .....	6
Tabel 2.1 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah .....	17
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	19
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	38
Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin .....	45
Tabel 4.3 Hasil Regresi Linear Berganda Kabupaten Musi Rawas Utara .....	52
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas Kabupaten Musi Rawas Utara.....	54
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi Kabupaten Musi Rawas Utara.....	55
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas Kabupaten Musi Rawas Utara.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji T Kabupaten Musi Rawas Utara.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji F Kabupaten Musi Rawas Utara.....	58
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi Kabupaten Musi Rawas Utara .....	59
Tabel 4.10 Hasil Regresi Linear Berganda Kabupaten Musi Banyuasin.....	64
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas Kabupaten Musi Banyuasin .....	67
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi Kabupaten Musi Banyuasin .....	67



Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas Kabupaten Musi Banyuasin .....	68
Tabel 4.14 Hasil Uji T Kabupaten Musi Banyuasin .....	69
Tabel 4.15 Hasil Uji F Kabupaten Musi Banyuasin .....	71
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Kabupaten Musi Banyuasin .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara ..	40
Gambar 4.2 Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	41
Gambar 4.3 Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	42
Gambar 4.4 Belanja Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	44
Gambar 4.5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin .....	47
Gambar 4.6 Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ..	48
Gambar 4.7 Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin..	49
Gambar 4.8 Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.....	51
Gambar 4.9 Uji Normalitas Kabupaten Musi Rawas Utara.....	54
Gambar 4.10 Uji Normalitas Kabupaten Musi Banyuasin.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Regresi Kabupaten Musi Rawas Utara .....	85
Lampiran 2 Hasil Regresi Linear Berganda Kabupaten Musi Rawas Utara....	85
Lampiran 3 Uji Normalitas Kabupaten Musi Rawas Utara .....	86
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas Kabupaten Musi Rawas Utara .....	86
Lampiran 5 Uji Autokorelasi Kabupaten Musi Rawas Utara .....	87
Lampiran 6 Uji Multikolinearitas Kabupaten Musi Rawas Utara .....	87
Lampiran 7 Data Regresi Kabupaten Musi Banyuasin .....	88
Lampiran 8 Hasil Regresi Linear Berganda Kabupaten Musi Banyuasin .....	88
Lampiran 9 Uji Normalitas Kabupaten Musi Banyuasin.....	89
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas Kabupaten Musi Banyuasin.....	89
Lampiran 11 Uji Autokorelasi Kabupaten Musi Banyuasin.....	90
Lampiran 12 Uji Multikolinearitas Kabupaten Musi Banyuasin .....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kegiatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah yang telah ditentukan melalui program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan mempunyai empat bagian pokok yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perubahan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan amanat dari dasar negara dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tinggi mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi lebih besar, sehingga mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan. Kemiskinan disebabkan ketidaksamaan sumber daya, distribusi pendapatan tidak merata, perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan akses modal. Pengentasan kemiskinan memerlukan rencana serta keputusan yang sesuai dengan kondisi

daerah oleh pemerintah, karena peningkatan penduduk miskin akan menjadi beban pembangunan.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan peran dan fungsi pembangunan sesuai wewenang yang dimiliki serta desentralisasi otonomi daerah dibedakan menjadi administratif, fiskal, politik, dan ekonomi. Aspek desentralisasi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan pengendalian hubungan yang selaras antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal mempunyai sasaran utama, yaitu melaksanakan aspirasi daerah mengenai penggunaan sumber keuangan daerah, memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pembangunan, meminimalisir kesenjangan, mengoptimalkan tanggung jawab, keterbukaan, pelayanan masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah daerah, oleh karena itu desentralisasi fiskal paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola dan mengatur keuangan sesuai ketentuan peraturan serta berhak untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah menjadi hal utama dalam merealisasikan fungsi dan peran otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dari peningkatan peran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD dijadikan sebagai indikator untuk mencapai target

pembangunan dan sumber pendapatan utama bagi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah mengindikasikan bahwa daerah telah memanfaatkan potensi secara optimal hal ini mempengaruhi percepatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien (Handayani et al., 2021).

Kemandirian keuangan daerah menginterpretasikan kesiapan pemerintah daerah mendanai pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, dan pelayanan publik, hal ini mengakibatkan rendahnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah. Pemerintah pusat berwenang serta berkewajiban memberikan sumber pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan. Dana transfer daerah atau dana perimbangan menjadi sumber utama pendanaan pemerintah pusat. Parameter tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dibuktikan dengan mengkomparasikan PAD dan dana perimbangan, apabila PAD besar maka keterlibatan pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah semakin kecil, dan sebaliknya (Prakoso et al., 2019).

Pemerintah daerah berkewajiban mengelola, mengeksplorasi, dan merealisasikan keuangan daerah sesuai kebutuhan skala prioritas berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip efektif dan efisien sehingga mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Indikator dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah (Febiandani & Suseno, 2016).

Belanja daerah bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah daerah. Peningkatan belanja daerah mempengaruhi kegiatan dan perluasan perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan fiskal dalam bentuk belanja daerah bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan (Sendow et al., 2018).

Penyediaan belanja daerah pada bidang pelayanan dasar akan memajukan pembangunan, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menstimulus perekonomian daerah sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan agar hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin. Belanja daerah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan apabila alokasi belanja daerah tepat sasaran (Zakariya, 2016).

Kemiskinan menjadi permasalahan utama di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, karena persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dan termasuk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara berada di peringkat pertama yaitu sebesar 19,12 persen, disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,41 persen yang berada di peringkat kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari tahun 2015-2020 persentase penduduk

miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin termasuk tertinggi karena persentasenya di atas 10 persen.

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada, serta membuat kebijakan dan mengalokasikan APBD secara tepat guna. Otonomi daerah berperan penting dalam tahapan pembangunan, berarti daerah berkewajiban memperlancar dan mewujudkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Daerah dikatakan mampu melaksanakan roda pemerintahan diketahui dari kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2.

**Tabel 1.1 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Daerah
2015	4.73%	5.46%	670,724,435,161
2016	3.95%	4.72%	720,300,821,539
2017	7.33%	9.41%	762,371,904,142
2018	3.27%	4.10%	867,583,014,236
2019	3.69%	4.92%	1,067,473,093,707
2020	5.44%	7.91%	919,133,792,277

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020, data diolah



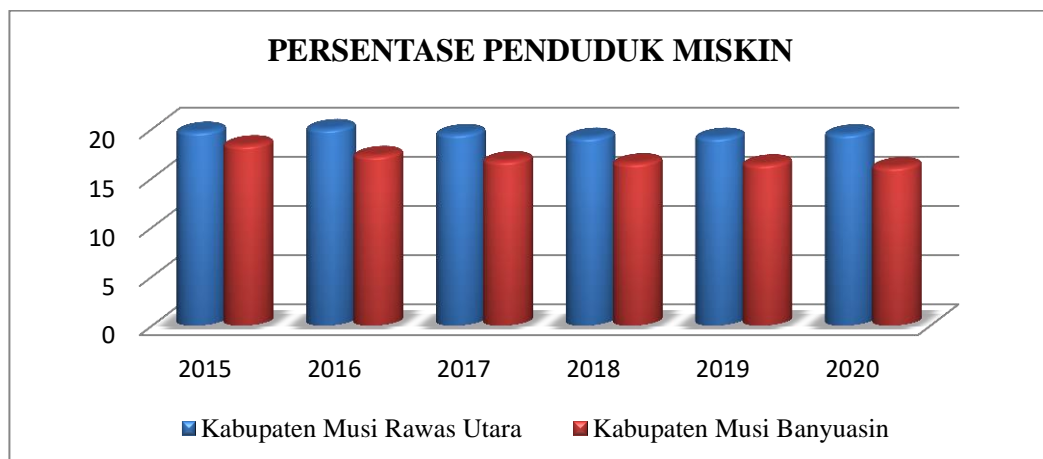
Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara 2015-2020 berada pada rentang 0.00% – 10.00% maka dikategorikan sangat kurang, hal ini mempengaruhi kesiapan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 0% - 25% maka dikategorikan pola hubungan instruktif, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. Sedangkan belanja daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan trend cenderung positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih ada permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung meningkat, kondisi tersebut tergambar pada Gambar 1.1.

**Tabel 1.2 Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin**

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Daerah
2015	8.94%	10.95%	2,096,431,426,307
2016	6.40%	7.26%	2,625,127,110,825
2017	7.92%	9.17%	2,619,480,025,846
2018	6.96%	8.76%	2,958,060,291,946
2019	7.66%	9.24%	3,647,212,439,377
2020	10.00%	13.53%	3,377,578,658,991

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2020 berada pada rentang 0.00% – 10.00% maka dikategorikan sangat kurang, hal ini mempengaruhi kesiapan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 0% - 25% maka dikategorikan pola hubungan instruktif, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. Sedangkan belanja daerah di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan trend cenderung positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih ada permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi, kondisi tersebut tergambar pada Gambar 1.1.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2020, data diolah

**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin**

Berdasarkan Gambar 1.1 persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin menunjukkan trend cenderung fluktuatif,

2015 persentase penduduk miskin mencapai 19,73 persen, menurun pada 2018 menjadi 19,12 persen, kemudian mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 19,47 persen di Kabupaten Musi Rawas Utara. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2015 mencapai 18,35 persen, menurun pada 2018 menjadi 16,52 persen, dan kembali menurun pada 2020 menjadi 16,13 persen, tetapi kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin termasuk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sehingga pemerintah daerah dituntut serta berkewajiban untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan secara maksimal.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, selaras dengan tujuan desentralisasi agar pemerintah mampu lebih cepat melayani kebutuhan dasar penduduk miskin, dengan membuat kebijakan dan mengalokasikan APBD secara tepat guna. Selain itu kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah cenderung mengalami peningkatan, tetapi kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin termasuk tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, oleh sebab itu tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin baik secara simultan dan parsial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini semoga berfungsi dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan, sumbangsi pemikiran sekaligus bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai program dan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan penanggulangan pengentasan kemiskinan dan memaksimalkan sumber pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, serta penelitian ini juga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, N., Neneng, S., & Marpaung, K. (2021). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 1(1), 1–7. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jepupr/article/view/3505>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. (2021). *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021*. <https://musibanyuasin.kab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e68979de29c9e9b7d8439e8c/kabupaten-musi-banyuasin-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. (2021). *Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka 2021*. <https://muratarakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/b379e468b1dfb3bea4290b25/kabupaten-musi-rawas-utara-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2020). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota*. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/23/604/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=-&pemda=->
- Fasholla, R. T. (2018). Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011 – 2016 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016). *Dspace UIII*, 1–19. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7333>
- Febiandani, R., & Suseno, D. A. (2016). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217–225. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22035>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31536>
- Hafan, F. A. (2019). Analysis of The Performance of Regional Financial Management and The Effect on Poverty Levels in Magelang Regency.

*Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(2), 72–79.  
<https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/view/44403>

- Hafan, F. A., & Panggiarti, E. K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 61–76. <https://doi.org/10.35449/JEMASI.V16I2.150>
- Handayani, M., Sari, R. K., & Sulistyowati, A. (2021). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 23–30. <https://journal.stimaimmi.ac.id/index.php/aliansi/article/view/81>
- Hutabarat, E., & Sriyono, D. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013. *Diss. UAJY*, 1–10.
- Kaat, M. H., Kindangen, P.-, & Rotinsulu, D. C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6), 1–18. <https://doi.org/10.35794/JPEKD.16458.19.3.2017>
- Laraswati, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4101>
- Lista, Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2008-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(3). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1552>
- Manggu, S. A. R. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. *Jurnal Akrab Juara*, 4(1), 45–55. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/462>
- Norsain, & Rofik, M. (2022). Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–417. <http://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/354>
- Omodero, C. O. (2019). Government Sectoral Expenditure and Poverty Alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80–90. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80>
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan

- Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V6I1.513>
- Putri, R. N. H., & Saputra, S. P. M. A. (2019). Decentralization and Financial Local Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending, Economic Growth, and Poverty in East Java Indonesia? *Journal of Poverty, Investment and Development*, 51, 37–49. <https://doi.org/10.7176/JPID/51-04>
- Rotinsulu, D. C., Tenda, A. R., & Leonufina, L. M. (2016). Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(3). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.14202.18.3.2016>
- Sasana, H., & Kusuma, P. (2018). Government Expenditure and Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(10), 142. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3125>
- Sendow, R. H., Koleangan, R. A. ., & Rotinsulu, T. O. (2018). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 15–32. <https://doi.org/10.35794/JPEKD.32715.19.1.2018>
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Publik*, 11(2), 1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/793>
- Suryanta. (2019). Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Depok. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 372–389. <https://doi.org/10.30862/CM-BJ.V2I2.45>
- Tias, N. N. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2063>
- Varlitya, C. R., Masbar, R., Jamal, A., & Nasir, M. (2018). Do Fiscal Decentralization and Human Development Index Affect Poverty in Indonesia? *Atlantis Press*, 292(AGC), 563–573. <https://doi.org/10.2991/agc->

18.2019.84

- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 182–191. <https://doi.org/10.35906/JEP01.V6I2.625>
- Wurangian, S., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomohon (Studi Kasus di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 64–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/14584>
- Zakariya, A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3108>